

Laporan Final Pemetaan Pemimpin Lokal Informal

Tim Penulis

Benny D Setianto
Adrianus Bintang Hanto Nugroho
Theresia Dwi Hastuti
Ridwan Sanjaya
Andre Kurniawan Pamudji
Stephanie Inggrid

Konsorsium Inklusif



Ringkasan Eksekutif

Ini adalah laporan hasil Kelompok Diskusi Terarah (FGD-Focus group Discussion) yang dilakukan di 6 (enam) kota di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Tujuan utama dari FGD adalah menemukan dinamika hubungan antar agama dan kepercayaan yang ada di ke-enam Lokasi untuk menemukan peran dan fungsi para pemimpin lokal demi terwujudnya perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pemilihan kota-kota yang digunakan sebagai Lokasi FGD dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik kota dikaitkan dengan struktur mayoritas dan minoritas yang unik dan berbeda-beda. Keterlibatan panitia lokal menjadi keharusan agar kita bisa menemukan kelompok-kelompok keagamaan dan kepercayaan yang selama ini tidak bisa diketahui keberadaannya oleh masyarakat luar, serta membantu kelancaran pelaksanaan FGD untuk hal-hal teknis lainnya.

Setiap pertemuan dilakukan dengan pengantar singkat dari tim Unika SOEGIJAPRANATA yang kemudian diikuti oleh beberapa pertanyaan yang menjadi pemantik diskusi di antara mereka yang hadir.

Beberapa hal menarik yang menjadi catatan khusus kami dari 6 FGD yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

- Secara umum kami menemukan bahwa ada kelompok mikro minoritas di enam kota yang kita kunjungi.
- Di Ambon kami menemukan bahwa masih ada potensi untuk terjadi konflik karena kita melihat beberapa daerah masih dijaga aparat secara khusus
- Di Manado; meskipun kota itu langganan 10 besar kota tertoleran di Indonesia versi Setara Institute, tapi dari diskusi ada dua hal yang mencolok yaitu peminggiran terhadap kelompok kepercayaan (dalam pertemuan diwakili oleh Lalang Rondor Malesung) dan semacam relasi "bara dalam sekam" antara orang Kristen dan Islam. Misalnya ungkapan orang Kristen tentang "kepala KUA Manado dan Sulut kok Islam, padahal ini wilayah mayoritas Kristen", Atau ungkapan bernada emosional tentang peristiwa didirikannya masjid di lahan bekas Kampung Texas. Peristiwa keributan antara massa adat dan massa pro Palestina di Kota Bitung beberapa waktu lalu juga menjadi penanda bahwa daerah Sulut pada umumnya masih ada "bara dalam sekam"
- Di Kupang relasi antara "tuan rumah (tuan tanah) Kristen" dengan pendatang Katolik dari Flores atau pedalaman Timor dan dengan pendatang Islam dari Solor, Alor, Sulawesi Selatan, dan Jawa berjalan dengan baik. Yang menarik nampaknya orang-orang Islam Solor dan Alor menjadi semacam "mediator" antara orang-orang NTT yang kristiani dengan orang-orang Islam non-NTT. Karena dalam posisi itu mereka seperti "outsider-within", jadi mereka mengerti tentang kekristenan sehingga dapat "membimbing" orang-orang Islam yang datang untuk menyesuaikan diri. Upaya penyesuaian pendatang Islam dapat terlihat

dengan "ungkapan protes" mereka terhadap asap sate babi yang dijual di pinggir jalan. Sedangkan "tuan rumah" dapat menyesuaikan dirinya dengan keberagaman agama akibat migrasi dengan cara menyerahkan jabatan "seksi konsumsi" acara-acara umum kepada orang-orang Islam

- Di Depok, yang menjadi langganan 10 besar kota tertoleran di Indonesia menurut versi Setara Institute, kelompok mikro minoritas terutama Ahmadiyah masih mendapatkan tindakan diskriminasi. Misalnya mereka dilarang beraktivitas di masjid mereka sejak 2011 oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan butir "kontroversial" yang menyatakan kelompok minoritas sebagai biang masalah di RPJMD.
- Di Surabaya sempat terjadi permasalahan pendirian gereja GKI Citraland dan permasalahan perpanjangan perijinan masjid kelompok Ahmadiyah. Peran MUI sangat kuat di Surabaya.
- Di Denpasar, permasalahan antar agama justru tidak terjadi. Sebaliknya permasalahan yang terjadi adalah di antara komunitas-komunitas keagamaan di dalam Agama Hindu, yaitu antara penganut Hindu Bali dengan penganut Hindu transnasional yaitu Hare Krishna (International Society for Krishna Consciousness [ISKCON]).

Executive Summary

This is the report of the results of the Focus Group Discussion (FGD-Focus Group Discussion) conducted in 6 (six) cities in Indonesia with different characteristics. The main objective of the FGD is to discover the dynamics of interfaith and belief relations in the six locations to find the roles and functions of local leaders for the realization of the protection of freedom of religion and belief.

The selection of cities used as FGD locations was carried out by considering the differences in city characteristics associated with the unique and varied majority and minority structures. The involvement of local committees is a must so that we can find religious and belief groups whose existence has not been known to the outside community, as well as help the smooth implementation of FGD for other technical matters.

Each meeting was conducted with a brief introduction from the Unika SOEGIJAPRANATA team which was then followed by several questions that sparked discussion among those present.

Some of the interesting things that are our special notes from the 6 FGDs that we did are as follows:

- In general we found that there were micro-minority groups in the six cities we visited.
- In Ambon we found that there is still the potential for conflict because we see that some areas are still guarded by special apparatus
- In Manado; Although the city is one of the top 10 most tolerant cities in Indonesia by the Setara Institute, from the discussion there are two striking things, namely the marginalization of faith groups (represented by Lalang Rondor Malesung in the meeting) and a kind of "coal in the chaff" relationship between Christians and Muslims. For

example, Christian expressions about "the head of KUA Manado and North Sulawesi are Islamic, even though this is a Christian-majority area", or emotional expressions about the establishment of a mosque on the land of the former Texas Village. The riot between indigenous and pro-Palestinian masses in Bitung City some time ago is also a sign that the North Sulawesi region in general still has "coals in the chaff"

- In Kupang relations between "Christian hosts" and Catholic immigrants from Flores or the interior of Timor and with Muslim immigrants from Solor, Alor, South Sulawesi, and Java went well. Interestingly, it seems that the Solor and Alor Muslims have become a kind of "mediator" between the Christian people of NTT and the non-NTT Muslims. Because in that position they are like "outsiders-within", so they understand Christianity so that they can "guide" the Muslims who come to adjust. The adjustment efforts of Muslim immigrants can be seen in their "expressions of protest" against the smoke of pork satay sold on the roadside. Meanwhile, the "host" can adjust itself to religious diversity due to migration by handing over the position of "consumption section" of public events to Muslims.
- In Depok, which is one of the top 10 most tolerant cities in Indonesia according to the Setara Institute, micro-minority groups, especially Ahmadiyya, still receive acts of discrimination. For example, they have been banned from activities in their mosques since 2011 by the government. In addition, the government also issued a "controversial" item that stated that minority groups were the culprits in the RPJMD.
- In Surabaya, there was a problem with the establishment of the GKI Citraland church and the problem of extending the license of the Ahmadiyah group mosque. The role of the MUI is very strong in Surabaya.
- In Denpasar, interfaith problems do not occur. On the contrary, the problem that occurs is between religious communities in Hinduism, namely between Balinese Hindus and transnational Hindus, namely Hare Krishna (International Society for Krishna Consciousness [ISKCON]).

HASIL FGD-PEMETAAN PEMIMPIN LOKAL INFORMAL

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sejak berdirinya memiliki keberagaman. Hal ini termaktub dalam semboyan resmi negara Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman itu tidak hanya dalam bentuk keberagaman etnisitas atau suku bangsa tetapi juga keberagaman kehidupan beragama dan berkeyakinan.

Masuknya berbagai macam agama global seperti Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Islam serta berbagai agama global lainnya, tidak serta merta menghilangkan juga kepercayaan dan keyakinan lokal. Masih tetap bisa ditemukan komunitas-komunitas yang menghayati berbagai macam aliran kepercayaan dan keyakinan baik yang bersifat lokal maupun global.

Pemetaan ini perlu juga dilakukan untuk mengisi *gap data* resmi pemerintah yang hanya mengakui enam agama ditambah dengan aliran penghayat yang dikelompok menjadi satu. Padahal dalam kenyataannya ada banyak agama-agama lainnya dan kepercayaan-kepercayaan lainnya yang tidak bisa dikelompokkan menjadi satu begitu saja.

Belum lagi, setiap tahun selalu muncul permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan peribadahan dari agama, kepercayaan dan keyakinan yang ada di Indonesia, terutama jika agama dan kepercayaan tersebut menjadi minoritas di lokalitas tertentu.

Atas dasar itulah, pemetaan ini dilakukan untuk menemukan pemimpin-pemimpin lokal

RESULTS OF FGD-MAPPING INFORMAL LOCAL LEADERS

Backgrounds

The Indonesian state is a country that since its establishment has diversity. This is contained in the official motto of the state Bhineka Tunggal Ika. Diversity is not only in the form of diversity of ethnicities but also diversity of religious life and beliefs.

The entry of various global religions such as Hinduism, Buddhism, Christianity, Catholicism and Islam as well as various other global religions, does not necessarily eliminate local beliefs and beliefs. There are still communities that live various streams of beliefs and beliefs both local and global.

This mapping also needs to be done to fill the gap in official government data that only recognizes six religions plus the flow of believers grouped into one. In reality, there are many other religions and beliefs that cannot be grouped together.

Not to mention, every year there are always problems related to the implementation of worship activities from religions, beliefs and beliefs that exist in Indonesia, especially if these religions and beliefs are a minority in certain localities.

On that basis, this mapping was carried out to find local leaders from both majority and minority groups to strive for a Joint Movement for inclusiveness of religious and religious life in Indonesia.

In conducting this mapping, five cities were chosen as the venue for the Focus Group Discussion (FGD) by inviting local leaders. The

baik yang berasal dari kelompok mayoritas maupun minoritas untuk mengupayakan Gerakan Bersama bagi inklusivitas kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Dalam melakukan pemetaan ini, lima kota dipilih sebagai tempat dilakukannya Diskusi Kelompok Terarah (FGD-Focus Group Discussion) dengan mengundang pemimpin-pemimpin lokal. Kota-kota yang dipilih disandarkan kepada beberapa asumsi:

1. Keberagaman mayoritas agamanya
2. Pernah terjadi konflik antar agama
3. Pemimpin lokalnya diasumsikan memiliki persepsi yang berbeda atas keberagaman keber-agama-an di daerahnya
4. Jejaring yang kita miliki untuk menjadi panitia lokal

Metode

Pemetaan pemimpin lokal dilakukan dengan mengadakan Kelompok Diskusi Terarah (FGD-Focus Group Discussion) di lima kota di Indonesia. Kelompok Diskusi Terarah ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk peserta yang jumlahnya relative terbatas namun bisa diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikendalikan oleh seorang moderator.

Diskusi semacam ini dinilai lebih efektif jika kedudukan masing-masing peserta dianggap setara, sehingga sekalipun mereka tahu afiliasinya masing-masing. Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi ini lebih mengarah kepada kedalaman informasi kualitatif sehingga jumlah pertanyaannya dibatasi dan sangat terarah.

Dalam kegiatan ini, pertanyaan dibatasi tidak lebih dari 7 buah dengan harapan setiap pertanyaan akan dijawab oleh semua peserta

selected cities are based on several assumptions:

1. The diversity of the majority of religions
2. There have been conflicts between religions
3. Local leaders are assumed to have different perceptions of religious diversity in their area
4. The network we have to become a local committee

Methods

Local leader mapping was carried out by holding Focus Group Discussions (FGDs) in five cities in Indonesia. This Directed Discussion Group is a research method used for participants who are relatively limited in number but can be directed to answer questions controlled by a moderator.

This kind of discussion is considered more effective if the position of each participant is considered equal, even if they know their respective affiliations. The questions asked in this discussion are more directed to the depth of qualitative information so that the number of questions is limited and very directed.

In this activity, questions are limited to no more than 7 questions with the hope that each question will be answered by all participants with their own perspectives. The moderator functions more as a person who ensures that participants feel free and comfortable to express their opinions without fear and anxiety if the answer will make their position and position threatened. The moderator also ensures that representative answers are conveyed in the discussion so that the questions asked have been answered with a diversity of perspectives.

dengan perspektif mereka masing-masing. Moderator lebih berfungsi sebagai orang yang memastikan bahwa para peserta merasa bebas dan nyaman untuk menyampaikan pendapatnya tanpa merasa takut dan was-was jika jawabannya akan membuat kedudukan dan posisinya terancam. Moderator juga memastikan bahwa keterwakilan jawaban disampaikan dalam diskusi sehingga pertanyaan yang diajukan telah dijawab dengan keberagaman perspektif.

Profil Kota

Ambon:

Kota Ambon adalah ibu kota dari Propinsi Maluku. Dengan luas wilayah 377 km² dengan suku bangsa yang dominan adalah suku Ambon. Data BPS pada tahun 2022, ada 348.225 jiwa yang tinggal di kota Ambon, dengan jumlah lelaki 173.823 jiwa dan 174.402 jiwa. Kota ini terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri dan 10 desa. Data yang ada pada pemerintah tercatat 57,99% beragama Kristen, 2,40% adalah Katolik. Penganut Islam ada 38,77%, Hindu 0,13% dan 0,04 % beragama Budha.

Depok:

Kota terletak di Propinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 200,29 km² dengan suku bangsa yang dominan adalah suku Betawi, Jawa, Batak, Minangkabau, Tionghoa dan Cirebon. Data BPS pada tahun 2022, ada 2.123.349 jiwa yang tinggal di kota Depok, dengan jumlah lelaki 223.632 jiwa dan 218.649 jiwa. Kota ini terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Data yang ada pada pemerintah tercatat 4,77% beragama Kristen, 1,51% adalah Katolik. Penganut Islam ada 93,16%, Hindu 0,17%, Budha 0,28 % dan 0,11% beragama Konghucu

Cities' Profile:

Ambon

Ambon City is the capital of Maluku Province. With an area of 377 km² with the dominant ethnic group is the Ambonese tribe. BPS data in 2022, there are 348,225 people living in the city of Ambon, with 173,823 men and 174,402 people. The city consists of 5 sub-districts, 20 kelurahan, 20 states and 10 villages. Data available to the government recorded 57.99% Christian, 2.40% Catholic. Muslims are 38.77%, Hindus are 0.13% and 0.04% are Buddhists.

Depok:

The city is located in West Java Province. With an area of 200.29 km² with the dominant ethnic groups are Betawi, Javanese, Batak, Minangkabau, Chinese and Cirebon. BPS data in 2022, there are 2,123,349 people living in Depok city, with 223,632 men and 218,649 people. The city consists of 11 sub-districts and 63 kelurahan. Data available to the government recorded 4.77% Christian, 1.51% Catholic. Muslims are 93.16%, Hindus 0.17%, Buddhists 0.28% and 0.11% Confucians

Kupang:

Kupang City is the capital of East Nusa Tenggara Province. With an area of 152.59 km² with the dominant ethnic groups are Timorese, Rote, Sabu, Chinese, Flores and Bugis. BPS data in 2022, there are 442,281 people living in Kupang city, with 223,632 men and 218,649 women. The city consists of 6 sub-districts and 51 kelurahan. Data available to the government recorded 64.04% Christian, 21.07% Catholic. Muslims are 14.34%, Hindus are 0.51% and 0.04% are Buddhists.

Kupang: Kota Kupang adalah ibu kota dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan luas wilayah 152,59 km² dengan suku bangsa yang dominan adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan Bugis. Data BPS pada tahun 2022, ada 442.281 jiwa yang tinggal di kota Kupang, dengan jumlah lelaki 223.632 jiwa dan perempuan sebanyak 218.649 jiwa. Kota ini terdiri dari 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Data yang ada pada pemerintah tercatat 64,04% beragama Kristen, 21,07% adalah Katolik. Penganut Islam ada 14,34%, Hindu 0,51% dan 0,04 % beragama Budha. Manado: Kota Manado adalah ibu kota dari Propinsi Sulawesi Utara. Dengan luas wilayah 162,53 km² dengan suku bangsa yang dominan adalah suku Minahasa, Sangir, Bantik, Gorontalo, dan Mongondow. Data BPS pada tahun 2022, ada 454.606 jiwa yang tinggal di kota Manado, dengan jumlah lelaki 228.011 jiwa dan perempuan sebanyak 226.595 jiwa. Kota ini terdiri dari 11 kecamatan dan 87 kelurahan. Data yang ada pada pemerintah tercatat 62,94% beragama Kristen, 5,25% adalah Katolik. Penganut Islam ada 30,95%, Hindu 0,17%, 0,63 % beragama Budha dan 0,06% penganut Konghucu Surabaya: Kota Surabaya adalah ibu kota dari Propinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah 335,28 km² dengan suku bangsa yang dominan adalah suku Jawa, Madura, Tionghoa, dan Arab. Data BPS pada tahun 2022, ada 2.987.863 jiwa yang tinggal di kota Surabaya, dengan jumlah lelaki 1.479.715 jiwa dan perempuan sebanyak 1.508.148 jiwa. Kota ini terdiri dari 11 kecamatan dan 87 kelurahan. Data yang ada	Manado: Manado City is the capital of North Sulawesi Province. With an area of 162.53 km² with the dominant ethnic groups are Minahasa, Sangir, Bantik, Gorontalo, and Mongondow. BPS data in 2022, there are 454,606 people living in the city of Manado, with 228,011 men and 226,595 women. The city consists of 11 sub-districts and 87 kelurahan. Data available to the government recorded 62.94% Christian, 5.25% Catholic. There are 30.95% Muslims, 0.17% Hindus, 0.63% Buddhists and 0.06% Confucians Surabaya: Surabaya City is the capital of East Java Province. With an area of 335.28 km² with the dominant ethnic groups are Javanese, Madurese, Chinese, and Arabs. BPS data in 2022, there are 2,987,863 people living in the city of Surabaya, with 1,479,715 men and 1,508,148 women. The city consists of 11 sub-districts and 87 kelurahan. Data available to the government recorded 8.89% Christians, 3.91% were Catholics. There are 85.50% Muslims, 0.25% Hindus, 1.42% Buddhists and 0.02% Confucians. Denpasar: The city of Denpasar is the capital of the Province of Bali. The provincial capital has an area of 125.98 km² with an altitude of about 4m above sea level. Balinese ethnicity is the most dominant until it reaches around 65%, followed by Javanese which reaches 25%. Hinduism is the majority religion of around 63%, Islam ranks second in the most to reach 28% of the total population. Christians 5%, Catholics similar to Buddhists, with percentages of about 2.36 and 2.37. It is divided into 4 sub-districts and 43 villages.
--	--

pada pemerintah tercatat 8,89% beragama Kristen, 3,91% adalah Katolik. Penganut Islam ada 85,50%, Hindu 0,25%, 1,42 % beragama Budha dan 0,02% penganut Konghucu

Denpasar:

Kota Denpasar adalah ibukota Propinsi Bali. Ibukota propinsi ini memiliki luasan wilayah sebesar 125,98 km² dengan ketinggian sekitar 4m di atas permukaan laut. Etnisa Bali paling dominan hingga mencapai sekitar 65% diikuti dengan Jawa yang mencapai 25%-nya. Hindu menjadi agama mayoritas sekitar 63%, Islam menempati urutan terbanyak kedua hingga mencapai 28% dari total pendudukan. Kristen 5%, Katolik yang mirip dengan Budha, dengan prosentase sekitar 2,36 dan 2,37. Terbagi ke dalam 4 kecamatan dan 43 desa.

Proses Pra-FGD

Dalam menjalankan kegiatan Kelompok Diskusi Terarah (FGD), tim ini selalu bekerjasama atau meminta bantuan anggota konsorsium. Pemilihan orang/organisasi/Lembaga yang diajak Kerjasama dilakukan secara sepihak atas dasar sesama anggota konsorsium atau kenalan salah satu anggota tim.

Pokok-pokok informasi penting yang disampaikan kepada pihak yang bekerjasama (selanjutnya disebut panitia lokal) adalah:

1. Jumlah Peserta dibatasi antara 15-20 orang
2. Keberagaman latar belakang peserta dari latar belakang agama dan aliran kepercayaan
3. Keberagaman peserta dari gendernya
4. Keberagaman latar belakang peserta dari usia
5. Keberagaman latar belakang peserta dari posisinya

Pre-FGD

In carrying out Focus Discussion Group (FGD) activities, this team always collaborates or asks for help from consortium members. The selection of people/organizations/institutions invited to cooperate is carried out unilaterally on the basis of fellow consortium members or acquaintances of one of the team members.

The main important information submitted to the cooperating parties (hereinafter referred to as the local committee) are:

1. The number of Participants is limited to 15-20 people
2. Diversity of backgrounds of participants from religious backgrounds and streams of belief
3. Diversity of participants by gender
4. Diversity of participants' backgrounds of ages
5. Diversity of participants' backgrounds from their positions
6. Help find meeting locations, rental costs, including equipment and consumption

After getting information from the local committee, there are two processes carried out. First, the SOEGIJAPRANATA Catholic University team then sent a proposal for FGD activities which was then forwarded to prospective participants who had previously been given a list by the Local Committee. Then, between the local committee and the SOEGIJAPRANATA Catholic University team coordinated with each other to confirm with the participants. If there are participants who apparently cannot, efforts will be made to find a replacement by considering the things mentioned earlier.

6. Membantu mencari lokasi pertemuan, biaya sewa, termasuk perlengkapan dan konsumsi Setelah mendapatkan informasi dari panitia lokal maka ada dua proses yang dilakukan. Pertama, tim Unika SOEGIJAPRANATA kemudian mengirimkan proposal kegiatan FGD yang kemudian diteruskan kepada para calon peserta yang sebelumnya sudah diberikan daftarnya oleh Panitia Lokal. Kemudian, antara panitia lokal dan tim Unika SOEGIJAPRANATA saling berkoordinasi untuk melakukan konfirmasi kepada peserta. Jika ada peserta yang ternyata tidak bisa, maka akan diupayakan untuk mencari penggantinya dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Panitia Lokal Dalam menjalankan kegiatan Kelompok Diskusi Terarah (FGD), tim ini selalu bekerjasama atau meminta bantuan anggota konsorsium. Pemilihan orang/organisasi/lembaga yang diajak bekerjasama dilakukan secara sepihak atas dasar kesamaan sebagai anggota konsorsium atau berdasar jaringan perkenalan salah satu anggota tim. Pokok-pokok informasi penting yang disampaikan kepada pihak yang bekerjasama (selanjutnya disebut panitia lokal) adalah: 1. Jumlah Peserta dibatasi antara 15-20 orang 2. Keberagaman latar belakang peserta berdasarkan agama dan aliran kepercayaan 3. Keberagaman latar belakang peserta berdasarkan gender 4. Keberagaman latar belakang peserta berdasarkan usia	Local Committee Kupang: In Kupang, the team was assisted by Nusa Cendana University. Incidentally, there is a team member who has an S2 study friend first. After communicating, sending activity proposals, the local committee then identifies people who meet the team's criteria. The meeting took place at the Swissbell-court Hotel. Manado: Local committee in Manado from Sam Ratulangi University. Previously, the meeting was to be held in one of the rooms at Sam Ratulangi University, but with consideration due to frequent blackouts and incidentally the availability of generators was not adequate, then by the local committee, the location of the FGD was moved to a room in the DPD Office Building. Surabaya: The original plan for this FGD activity was to be held in Sampang-Madura, but after communicating with the local committee, in this case Fatayat NU East Java, the meeting was moved to Surabaya and invited representatives from Sampang. The meeting was held at Agis Restaurant. Ambon: The FGD meeting in Ambon was conducted by involving a local committee from the NGO Tifa Damai. Incidentally, SOEGIJAPRANATA Catholic University has collaborated several times for research on other topics. The FGD meeting in Ambon took place at Amaris Hotel. Depok: In the last city, Depok, the team asked for the help of fellow consortium members from the Setara Institute to help us identify the
---	--

5. Keberagaman latar belakang peserta berdasarkan posisinya di dalam masyarakat 6. Panitia lokal bertugas untuk membantu mencari lokasi pertemuan, bernegosiasi mengenai biaya sewa, termasuk menyediakan perlengkapan dan konsumsi Setelah tim mendapatkan informasi dari panitia lokal maka akan ada dua proses yang dilakukan. Pertama, tim Unika SOEGIJAPRANATA kemudian mengirimkan proposal kegiatan FGD yang kemudian diteruskan kepada para calon peserta yang sebelumnya sudah diberikan daftarnya oleh panitia lokal. Kemudian, antara panitia lokal dan tim Unika SOEGIJAPRANATA saling berkoordinasi untuk melakukan konfirmasi kepada peserta. Jika ada peserta yang ternyata tidak bisa, maka akan diupayakan untuk mencari penggantinya dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Partisipan FGD Kupang Di Kota Kupang, tim dibantu oleh panitia lokal yang merupakan dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana (Undana). Dosen Undana tersebut merupakan teman kuliah salah satu anggota tim semasa di Yogyakarta dulu. Setelah melakukan komunikasi dan mengirimkan proposal kegiatan maka panitia lokal kemudian mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi kriteria tim. Pertemuan FGD dilakukan pada 12 Mei 2023, pk 09.30-11.30, di Hotel Swissbell-court. Adapun peserta yang hadir mewakili latar belakang keagamaan, gender, dan usia yang beragam, yaitu:	participants to be invited. After obtaining the names of prospective participants, the SOEGIJAPRANATA Catholic University team made contact and confirmed attendance. The meeting was conducted by Hotel Fave. FGD Participants Kupang In Kupang City, the team was assisted by a local committee which were lecturers and students of the Political Science Study Program, Nusa Cendana University (Undana). The Undana lecturer was a college friend of one of the team members when he was in Yogyakarta. After communicating and sending activity proposals, the local committee then identifies people who meet the team's criteria. The FGD meeting will be held on May 12, 2023, 9:30 a.m. to 11:30 a.m., at Swissbell-court Hotel. The participants who attended represented various religious backgrounds, genders, and ages, namely: • Timorese Evangelical Church (religious organization) • Parisada Hindu Dharma Indonesia Kupang (religious organization) • Kupang Religious Harmony Forum (interfaith organization) • Fatayat Nahdlatul Ulama East Nusa Tenggara (Women's organization) • Nahdlatul Ulama Teachers Association of East Nusa Tenggara (educator organization) • Widya Mandira Catholic University (educational institution) • University of Muhammadiyah Kupang (educational institution) • Kupang Indonesian Christian Student Movement (student organization)
--	---

• Gereja Masehi Injili Timor (organisasi keagamaan) • Parisada Hindu Dharma Indonesia Kupang (organisasi keagamaan) • Forum Kerukunan Umat Beragama Kupang (organisasi lintas keagamaan) • Fatayat Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur (organisasi perempuan) • Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur (organisasi pendidik) • Universitas Katolik Widya Mandira (lembaga pendidikan) • Universitas Muhammadiyah Kupang (lembaga pendidikan) • Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kupang (organisasi kemahasiswaan) • Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kupang (organisasi kemahasiswaan) • Himpunan Mahasiswa Islam Kupang (organisasi kemahasiswaan) • Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Kupang (organisasi kemahasiswaan) • Mantan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki (tokoh masyarakat) • Kepala desa setempat (tokoh masyarakat)	• Kupang Indonesian National Student Movement (student organization) • Kupang Islamic Student Association (student organization) • Catholic Student Association of the Republic of Indonesia Kupang (student organization) • Former Regent of Kupang, Ayub Titu Eki (community leader) • Local village head (community leader)
Manado Panitia lokal di Manado merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Pertemuan FGD semula hendak dilakukan di salah satu ruangan di Unsrat, namun dengan pertimbangan bahwa ruangan tersebut sering mati lampu dan belum tersedianya genset yang memadai, maka oleh panitia lokal, lokasi FGD dipindah ke sebuah ruangan pertemuan di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Utara. Dalam FGD yang diselenggarakan pada 17 Mei 2023, pk 09.30-11.30, peserta yang hadir menunjukkan keberagaman dari segi latar belakang keagamaan dan kepercayaan, usia,	Manado The local committee in Manado is a lecturer at the Faculty of Law, Sam Ratulangi University (Unsrat). The FGD meeting was originally to be held in one of the rooms in Unsrat, but considering that the room often went out of lights and did not have adequate generators, the local committee moved the FGD location to a meeting room at the North Sulawesi Regional Representative Council Office. In the FGD held on May 17, 2023, at 09.30-11.30, participants who attended showed diversity in terms of religious background and belief, age, and gender. Here are the participants of FGD Manado: • Parisada Hindu Dharma Indonesia North Sulawesi (religious organization) • Representative of Indonesian Buddhists of North Sulawesi (religious organization) • Manado Religious Harmony Forum (interfaith organization) • Indonesian Khonghucu Religious Council Manado (religious organization) • Nahdlatul Ulama Manado Branch Management (religious organization) • Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sulawesi Utara (religious organization) • Jewish Community of North Sulawesi (religious organizations) • Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia North Sulawesi (trust organization)

dan juga gender. Berikut adalah peserta FGD Manado: • Parisada Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Utara (organisasi keagamaan) • Perwakilan Umat Buddha Indonesia Sulawesi Utara (organisasi keagamaan) • Forum Kerukunan Umat Beragama Manado (organisasi lintas keagamaan) • Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Manado (organisasi keagamaan) • Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Manado (organisasi keagamaan) • Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sulawesi Utara (organisasi keagamaan) • Komunitas Yahudi Sulawesi Utara (organisasi keagamaan) • Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Sulawesi Utara (organisasi kepercayaan) • Organisasi Adat Minaesa Tou Indonesia (organisasi adat) • Lembaga Adat Pakasaan Jawa Tondano (organisasi adat) • Majelis Pendidikan Kristen Indonesia (organisasi pendidik) • Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Sulawesi Utara (organisasi kemasyarakatan) • Rumah Nusantara (organisasi kemasyarakatan) • Perhimpunan Putra-putri Brimob Sulawesi Utara (organisasi kemasyarakatan) • Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Manado (organisasi kemahasiswaan) • Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Manado (organisasi kemahasiswaan) • Himpunan Mahasiswa Islam Manado (organisasi kemahasiswaan)	• Minaesa Tou Indonesia Indigenous Organization (indigenous organization) • Pakasaan Jawa Tondano Customary Institute (indigenous organization) • Indonesian Christian Education Council (educator organization) • Alumni Family of Universitas Gadjah Mada North Sulawesi (community organization) • Rumah Nusantara (community organization) • Perhimpunan Putra-Putri Brimob Sulawesi Utara (community organization) • National Student League for Democracy Manado (student organization) • Catholic Student Association of the Republic of Indonesia Manado (student organization) • Manado Islamic Student Association (student organization) Surabaya Initially, according to the plan, FGD activities will be held in Sampang Regency, Madura. However, after communicating with the local committee, namely Fatayat Nahdlatul Ulama East Java, the meeting was finally moved to Surabaya with a note that it still invited representatives from Sampang. The meeting will be held at Agis Restaurant on June 12, 2023. The following participants were present at the meeting: • Jama'at Ahmadiyah Indonesia Surabaya (religious organization) • Parisada Hindu Dharma Indonesia Surabaya (religious organization) • Indonesian Christian Church (religious organization) • Communion of Indonesian Churches East Java Region (religious organization) • Diocese of Surabaya (religious organization) • East Java Baha'i Community (religious organizations)
--	--

Surabaya Semula, sesuai dengan rencana, kegiatan FGD akan diadakan di Kabupaten Sampang, Madura. Namun setelah berkomunikasi dengan panitia lokal, yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, pertemuan akhirnya dipindahkan ke Surabaya dengan catatan tetap mengundang perwakilan dari Sampang. Pertemuan dilakukan di Rumah Makan Agis pada tanggal 12 Juni 2023. Berikut adalah peserta yang hadir pada pertemuan tersebut: • Jemaat Ahmadiyah Indonesia Surabaya (organisasi keagamaan) • Parisada Hindu Dharma Indonesia Surabaya (organisasi keagamaan) • Gereja Kristen Indonesia (organisasi keagamaan) • Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur (organisasi keagamaan) • Keuskupan Surabaya (organisasi keagamaan) • Komunitas Baha'i Jawa Timur (organisasi keagamaan) • Ahlulbait Indonesia Surabaya (organisasi keagamaan) • Huria Kristen Batak Protestan (organisasi keagamaan) • Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Surabaya (organisasi kepercayaan) • Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur (organisasi perempuan) • Jaringan Gusdurian Surabaya (organisasi kemasyarakatan) • Rumah Bhinneka (organisasi kemasyarakatan) Ambon Pertemuan FGD di Ambon dilakukan dengan melibatkan panitia lokal yang merupakan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat Institut Tifa Damai Maluku. Unika SOEGIJAPRANATA	• Ahlulbait Indonesia Surabaya (religious organization) • Huria Kristen Batak Protestant (religious organization) • Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Surabaya (trust organization) • Fatayat Nahdlatul Ulama East Java (women's organization) • Gusdurian Network Surabaya (community organization) • Rumah Bhinneka (community organization) Ambon The FGD meeting in Ambon was conducted by involving a local committee which is an activist of the Non-Governmental Organization Institut Tifa Damai Maluku. SOEGIJAPRANATA Catholic University has previously collaborated several times with the NGO to conduct research on other topics. The FGD meeting in Ambon will be held on June 27, 2023, 13.00-15.00, at Amaris Hotel. Here are the participants at the FGD: • Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku (women's organization) • Women and Children Empowerment Circle Foundation – LAPPAN (women's organization) • Women's Care Movement (women's organization) • Institut Tifa Damai Maluku (community organization) • Ahmadiyya Community Indonesia Maluku (religious organization) • Ahlulbait Indonesia Maluku (religious organization) • Parisada Hindu Dharma Indonesia Maluku (religious organization) • Indonesian Ulema Council Maluku (religious organization) • Indonesian Buddhist Association of Maluku (religious organization)
--	--

sebelumnya sudah pernah beberapa kali bekerjasama dengan LSM tersebut untuk melakukan penelitian-penelitian dengan topik lain. Pertemuan FGD di Ambon dilaksanakan pada 27 Juni 2023, pk 13.00-15.00, di Hotel Amaris. Berikut adalah peserta pada FGD tersebut: • Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku (organisasi perempuan) • Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak – LAPPAN (organisasi perempuan) • Gerakan Perempuan Peduli (organisasi perempuan) • Institut Tifa Damai Maluku (organisasi kemasyarakatan) • Jemaat Ahmadiyah Indonesia Maluku (organisasi keagamaan) • Ahlulbait Indonesia Maluku (organisasi keagamaan) • Parisada Hindu Dharma Indonesia Maluku (organisasi keagamaan) • Majelis Ulama Indonesia Maluku (organisasi keagamaan) • Persatuan Umat Buddha Indonesia Maluku (organisasi keagamaan) • Gereja Protestan Maluku (organisasi keagamaan) • Forum Kerukunan Umat Beragama Ambon (organisasi lintas keagamaan) • Ambon Ekspres (lembaga media) • Suara Maluku (lembaga media) • Universitas Kristen Indonesia Maluku (lembaga pendidikan) • Himpunan Mahasiswa Islam Ambon (organisasi kemahasiswaan) • Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Ambon (organisasi kemahasiswaan) • Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Ambon (organisasi kemahasiswaan)	• Moluccan Protestant Church (religious organization) • Ambon Religious Harmony Forum (interfaith organization) • Ambon Express (Media institution) • Suara Maluku (media agency) • Indonesian Christian University Maluku (educational institution) • Islamic Student Association of Ambon (student organization) • Indonesian Christian Student Movement Ambon (student organization) • Indonesian Islamic Student Movement Ambon (student organization) Depok During the last visit in Depok City, the team asked for help from fellow consortium members, namely Setara Institute, to help identify participants to be invited. After getting the names of prospective participants, the SOEGIJAPRANATA Catholic University team made contact and confirmed attendance. The meeting will be held on August 1, 2023, 10.00-12.00 at Fave Hotel. The following participants attended the FGD meeting: • Ahlulbait Indonesia Jabodetabek (religious organization) • Indonesian Ahmadiyya Jama'at Depok (religious organization) • Indonesian Buddhist Council Depok (religious organization) • Indonesian Khonghucu Religious Council Depok (religious organization) • Depok Religious Harmony Forum (interfaith organization) • Muslimah Ahlulbait Indonesia Jabodetabek (Women's organization) • Women Believers of Indonesia Depok (women's organization) • National Commission for Women (women's organization)
--	--

Depok Dalam lawatan di Kota Depok, tim meminta bantuan sesama anggota konsorsium yaitu Setara Institute untuk membantu melakukan identifikasi peserta yang akan diundang. Setelah mendapatkan nama-nama calon peserta, maka tim Unika SOEGIJAPRANATA melakukan kontak dan konfirmasi kehadiran. Pertemuan dilakukan pada 1 Agustus 2023, pk 10.00-12.00 di Hotel Fave. Berikut adalah peserta yang hadir di pertemuan FGD tersebut: • Ahlulbait Indonesia Jabodetabek (organisasi keagamaan) • Jemaat Ahmadiyah Indonesia Depok (organisasi keagamaan) • Majelis Agama Buddha Indonesia Depok (organisasi keagamaan) • Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Depok (organisasi keagamaan) • Forum Kerukunan Umat Beragama Depok (organisasi lintas keagamaan) • Muslimah Ahlulbait Indonesia Jabodetabek (organisasi perempuan) • Perempuan Penghayat Kepercayaan Indonesia Depok (organisasi perempuan) • Komisi Nasional Perempuan (organisasi perempuan) • Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Depok (organisasi pemerintahan) • Desantara Foundation (organisasi kemasyarakatan) • Yayasan Satu Keadilan (organisasi kemasyarakatan) • Yayasan Inklusif (organisasi kemasyarakatan) • Komisi Nasional Perempuan (organisasi perempuan) • Peace Leader Indonesia (organisasi kepemudaan) • Cahaya Guru (organisasi pendidik) • MediaLink (lembaga media)	• Islamic Extension Counselor of the Ministry of Religious Affairs of Depok (government organization) • Desantara Foundation (community organization) • One Justice Foundation (community organization) • Inclusive Foundation (community organization) • National Commission for Women (women's organization) • Peace Leader Indonesia (youth organization) • Light Teacher (educator organization) • MediaLink (media agency) • National Commission for Women (Women's organization) Denpasar: For the FGD in Denpasar, Unika Soegijapranata collaborated with lecturers from Udayana University. The meeting was held at the Pura Nusa Indah Hotel, Denpasar on March 18, 2024 at 09:00 – 12:00 WITA. The following are the names of the organizations present in Denpasar: • Chairman of the Bali Province Religious Harmony Forum • Chairman of the Assembly of the Protestant Christian Church in Bali, Bethlehem Church • High Council of Confucian Religion of Indonesia Bali Province • Indonesia Buddhist Association of Bali Province • Commission on Interreligious Relations and Beliefs of the Diocese of Denpasar • Chairman of PW GP Ansor Bali Province • Chairman of the Indonesia Hindu Dharma Parisada Bali Province
--	--

• Komisi Nasional Perempuan (organisasi perempuan) Denpasar: Untuk FGD di Denpasar, Unika Soegijapranata bekerjasama dengan dosen dari Universitas Udayana. Pertemuan dilakukan di Hotel Pura Nusa Indah, Denpasar pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 09:00 – 12:00 WITA. Berikut nama-nama organisasi yang hadir di Denpasar: • Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali • Ketua Majelis Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Betlehem • Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Provinsi Bali • Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Bali • Komisi Hubungan Antar Agama dan Keyakinan Keuskupan Denpasar • Ketua PW GP Ansor Provinsi Bali • Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali • Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia Provinsi Bali • Ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Provinsi Bali • Ahlul Bait Indonesia Provinsi Bali • Perempuan Penghayat Indonesia Provinsi Bali • Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Provinsi Bali • Jemaat Baha'i Provinsi Bali • Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali • Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Ekklesia	• Missionary of the Ahmadiyya Community of Indonesia in Bali Province • Chairman of the Indonesia Hindu Youth Association of Bali Province • Ahlul Bait Indonesia Bali Province • Women of Indonesia Believers in Bali Province • The Council of Indonesia Noble Trust of Bali Province • Baha'i Congregation of Bali Province • Hindu Dharma Women of Indonesia Bali Province • Protestant Church in Western Indonesia, Ekklesia Church FGD's Results <i>Inclusivity in RPJMD</i> The Regional Medium-Term Development Plan is the focus of the first discussion because this is where we can see how attentive local governments are to the issue of inclusivity since planning. By incorporating narratives such as freedom of religion and belief, religious tolerance, religious moderation and then pouring them into more concrete programs it becomes an indicator for more inclusive local governments. On the other hand, the existence of inclusivity programs contained in the RPJMD is also a good means for more planned and measurable inclusive activities. Of the five cities where the FGD was held, the average participant involved in the preparation of the RPJMD either from the community component through MusrenBang or from the bureaucratic side said that expressive inclusive terminology was not found. But activities that encourage religious tolerance already exist and are carried out based on regional development plans.
--	---

Hasil FGD

Inklusivitas dalam RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi fokus perbincangan yang pertama karena dari sinilah kita bisa melihat seberapa perhatian pemerintah daerah terhadap isu inklusivitas sejak dalam perencanaan. Dengan memasukkan narasi-narasi seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan, toleransi agama, moderasi beragama dan kemudian menuangkannya ke dalam program-program yang lebih konkrit menjadi indikator bagi pemerintah daerah yang lebih inklusif. Di sisi lain, keberadaan program-program inklusivitas yang tertuang dalam RPJMD juga menjadi sarana yang baik bagi terjadinya kegiatan-kegiatan inklusif yang lebih terencana dan terukur.

Dari lima kota tempat diadakannya FGD, rata-rata peserta yang terlibat dalam penyusunan RPJMD baik dari komponen masyarakat melalui MusrenBang ataupun dari sisi birokrat mengatakan bahwa terminologi inklusif secara ekspresif tidak ditemukan. Tetapi kegiatan-kegiatan yang mendorong terjadinya toleransi beragama sudah ada dan dijalankan berdasarkan rencana pembangunan daerah.

Alokasi anggaran untuk membantu pembangunan rumah ibadah menjadi tindakan yang jamak dan biasa dilakukan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten. Meski dasar proporsionalnya masih selalu dipertanyakan keadilannya. Ketika kemudian ditanyakan dalam diskusi yang berkembang kepada para penghayat kepercayaan, maka di semua kota tempat berlangsungnya FGD menjawab, tidak ada alokasi dana yang diberikan untuk mereka. Bahkan untuk kategori agama yang tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui saja tidak pernah

Budget allocation to help build houses of worship is a common and common action carried out by city/regency local governments. Although the proportional basis is still always questionable, its fairness. When asked in a growing discussion with believers, in all the cities where the FGD took place, no allocation of funds was given to them. Even for religious categories that are not included in the 6 recognized religions alone are never given. The reason is because they are not registered in official government documents, so it will be a finding of the BPK (Audit Agency) if it allocates a budget for them.

Thus, although the budget allocation for the construction of houses of worship can be interpreted as part of inclusive activities carried out by local governments, they are still bound by general state policies. As a result, its inclusivity is limited to recognized religions.

The budget allocation that is also widely carried out by local governments is the provision of subsidies for certain religious day celebrations. Especially for major holidays of a religion. Some regions show some changes in the attitude of local governments. In the past two years, it has begun to install ornaments of minority religions on the day of the religious celebration. However, the policy has not been fully implemented to all regions.

One of the FGD participants revealed that the democratization that occurred in Indonesia turned out to open up opportunities also for regional heads to be more inclined to serve the majority vote as their constituents. As a result, efforts to push an activity agenda (and budget) in the development plan are also affected by that reality.

[Statements/Real Actions of Tolerant/Intolerant Governments/Officials](#)

diberikan. Alasannya memang karena mereka tidak terdaftar dalam dokumen resmi pemerintah, sehingga justru akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kalau mengalokasi anggaran untuk mereka. Dengan demikian, meski dalam alokasi anggaran untuk pembangunan rumah ibadah bisa dimaknai sebagai bagian dari kegiatan inklusif yang dilakukan pemerintah daerah tetapi masih terikat dengan kebijakan umum negara. Akibatnya, inklusivitasnya terbatas kepada agama-agama yang diakui saja. Alokasi anggaran yang juga banyak dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pemberian subsidi bagi kegiatan perayaan-perayaan hari agama tertentu. Terutama untuk hari raya besar suatu agama. Beberapa daerah menunjukkan ada beberapa perubahan di sikap pemerintah daerah. Dua tahun terakhir ini mulai memasang ornamen-ornamen agama minoritas ketika hari perayaan agama tersebut. Namun, kebijakannya belum sepenuhnya terimplementasikan ke semua daerah. Salah satu peserta FGD mengungkapkan bahwa demokratisasi yang terjadi di Indonesia ternyata membuka peluang juga bagi kepala daerah untuk lebih condong melayani suara mayoritas sebagai konstituen mereka. Akibatnya, upaya mendesakkan suatu agenda kegiatan (dan anggaran) dalam rencana pembangunan juga terpengaruh dengan realitas itu. Pernyataan/Tindakan Nyata Pemerintah/Pejabat yang Toleran/Intoleran Pertanyaan kedua yang kami ajukan pada para peserta FGD di lima kota adalah mengenai apakah ada pernyataan dan tindakan toleran	The second question we asked the FGD participants in the five cities was whether there were tolerant or intolerant statements and actions taken by the government or local officials. This question is asked with the aim of knowing how local governments behave because it reflects their perspective in the context of strengthening or weakening inter-religious harmony in the region. From the five cities we visited, we found a general picture that government officials almost never formally publicly made statements intolerant of other religious communities, except emotional statements as individuals. In general, statements and actions regarding tolerance in public are when government officials convey congratulations on religious holidays, the placement and installation of religious attributes and symbols during holidays in public locations, and the celebration of religious and cultural holidays by local governments. Tolerant words and actions will be easily found in celebratory activities. However, statements and actions of intolerant government officials are also common, especially against micro-minority groups such as followers of beliefs, religious sects, and religions that have not been recognized by the government. These intolerant actions are in the form of limitations in gaining access to the fulfillment of civil rights such as religious education, marriage registration, and the establishment of houses of worship. Another thing that can be categorized as intolerant is the lack of formal recognition of the identity and existence of micro-minority groups in public locations and events. Local governments, from the city level to the RT level, are also cautious in taking policies related to issues concerning the fulfillment of civil rights of micro-minority groups. This caution is because the government seeks to
---	--

atau intoleran yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat setempat. Pertanyaan ini diajukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pemerintah lokal karena hal tersebut mencerminkan perspektif mereka dalam konteks memperkuat atau melemahkan kerukunan antar umat beragama di wilayahnya. Dari kelima kota yang kami kunjungi didapatkan gambaran secara umum yaitu bahwa pejabat pemerintahan hampir-hampir tidak pernah secara formal di depan publik mengeluarkan pernyataan yang bernada intoleran terhadap komunitas agama lain, kecuali pernyataan emosional sebagai individu. Secara umum pernyataan dan tindakan mengenai toleransi di depan publik adalah ketika pejabat pemerintahan menyampaikan ucapan selamat hari raya keagamaan, penempatan dan pemasangan atribut maupun simbol keagamaan saat hari raya di lokasi-lokasi publik, dan diadakannya perayaan peringatan hari raya keagamaan dan kebudayaan oleh pemerintah lokal. Perkataan dan tindakan yang bernada toleran akan mudah dijumpai dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat selebrasi. Meskipun demikian pernyataan maupun tindakan pejabat pemerintahan yang bernada intoleran juga jamak terjadi terutama terhadap kelompok mikro-minoritas seperti penghayat kepercayaan, aliran keagamaan, dan agama-agama yang belum diakui pemerintah. Tindakan intoleran tersebut berupa keterbatasan dalam mendapatkan akses terhadap pemenuhan hak-hak sipil seperti pendidikan keagamaan, pencatatan pernikahan, dan pendirian rumah ibadah. Hal lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan intoleran adalah minimnya pengakuan identitas dan eksistensi kelompok mikro-minoritas secara formal di lokasi-lokasi	maintain stability at the city level as well as at the level of the smallest citizen community, namely RT / RW / kelurahan / Village as well as because the government is said to be subject to pressure from intolerant groups. Tolerant actions carried out by the government are ultimately also related or related to the perpetuation of power (maintaining socio-political constituencies) and the economy. Although officials at the city level are quite familiar with the principles of inclusiveness, officials at lower levels do not understand these principles enough, so difficulties in accessing civil rights usually occur at the lowest level. Actors who played a role in Tolerant/intolerant events The third question given to FGD participants was who are the actors who play an important role in tolerant and intolerant events. This is important because these actors are the ones who drive tolerant/intolerant events at the local level. The hope is that by knowing who are the actors at the local level, dialogue can be intensified by inviting tolerant actors and reaching out to intolerant actors to encourage positive situations. In the five cities studied, all agreed that the role of local governments, religious leaders, as well as the Diverse Community Communication Forum (FKUB) is central in tolerant and intolerant events. In the context of local government, top-down power hierarchies are highly considered in policy formation. However, there are times when the city level government will follow the policies of the government at the lower level (RT / RW / Kelurahan / Village). Religious leaders have an important role in the context of formulating interpretations of the existence of other religions and beliefs. If the
--	--

dan acara-acara publik. Pemerintah lokal, mulai dari tingkat kota sampai tingkat RT juga berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil kelompok mikrominoritas. Kehati-hatian ini dikarenakan pemerintah berupaya menjaga stabilitas di tingkat kota maupun di tingkat komunitas warga yang paling kecil yaitu RT/RW/kelurahan/Desa selain juga karena pemerintah disebut tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Tindakan toleran/intoleran yang dilakukan pemerintah pada akhirnya juga berhubungan atau berkaitan dengan pelanggaran kekuasaan (memelihara konstituen sosial-politik) dan ekonomi. Meskipun pejabat di tingkat pemerintah kota cukup memahami prinsip-prinsip inklusifitas namun pejabat di tingkat yang lebih rendah belum cukup memahami prinsip-prinsip tersebut sehingga kesulitan-kesulitan untuk mengakses hak-hak sipil biasanya terjadi mulai di tingkat yang paling bawah. Aktor yang berperan dalam peristiwa Toleran/intoleran Pertanyaan ketiga yang diberikan kepada peserta FGD adalah siapakah aktor-aktor yang berperan penting dalam peristiwa toleran maupun intoleran. Hal ini penting didalami sebab aktor-aktor tersebutlah yang menggerakkan berbagai peristiwa toleran/intoleran di aras lokal. Harapannya dengan mengetahui siapa saja aktor di aras lokal maka dialog dapat diintensifkan dengan turut mengajak aktor-aktor toleran maupun menjangkau aktor-aktor intoleran untuk mendorong situasi yang positif. Di lima kota yang diteliti semuanya sepakat bahwa peran pemerintah lokal, para	resulting interpretation allows positive relations with followers of other religions and beliefs, a tolerant situation will be built, and vice versa. The role of FKUB as an organization tasked with being a forum for communication between religious organizations is also crucial. This is because FKUB has the authority to recommend the establishment of places of worship. In addition, in the two cities where the study took place, the important actor supporting the tolerant situation was the university. The academic community is important because it is a meeting place both physically and intellectually for people of different religions. In addition, the university is also a place to initiate interfaith dialogue activities through community service and community service. In the end, universities are a field for seeding seeds of tolerance and exchanging positive stories about interfaith relations. In addition, the voice of academics is also highly regarded by local governments, therefore it is important to encourage academics to understand the principles of inclusiveness. The media also has the potential to be an important actor both as an agent of spreading tolerance and vice versa. In some cities radio and local newspapers are the dominant media, but in general social media and online media are quick and easy for everyone to reach. In addition to the media, civil society organizations (CSOs) are also important actors that drive tolerance and intolerance. In the post-conflict context, CSOs initiated by women work very hard in promoting peace at the grassroots level. Through a wide and powerful network, CSOs are potential actors. The next actors are women, especially mothers. Women are the first educators in the family so the values and principles of peace and inclusiveness are spread and passed down
---	--

pemimpin agama, dan juga Forum Komunikasi Umat Beragam (FKUB) sangat sentral dalam berbagai peristiwa toleran maupun intoleran. Dalam konteks pemerintah lokal, hierarki kekuasaan dari atas ke bawah (<i>top-down</i>) sangat diperhatikan dalam pembentukan kebijakan. Meskipun demikian ada kalanya pemerintah tingkat kota akan mengikuti kebijakan dari pemerintah di tingkat bawah (RT/RW/Kelurahan/Desa). Para pemimpin agama memiliki peran penting dalam konteks perumusan interpretasi terhadap eksistensi agama dan kepercayaan lain. Jika interpretasi yang dihasilkan memungkinkan terjadinya relasi positif dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain maka situasi toleran akan terbangun, begitu juga sebaliknya. Peran FKUB sebagai organisasi yang bertugas menjadi wadah komunikasi antar organisasi keagamaan juga krusial. Hal ini dikarenakan FKUB memiliki wewenang untuk merekomendasikan pendirian tempat ibadah. Selain itu di dua kota tempat penelitian, aktor penting yang mendukung situasi toleran adalah universitas. Komunitas akademik menjadi penting sebab ia menjadi tempat pertemuan baik secara fisik maupun secara intelektual orang-orang dari berbagai agama yang berbeda. Selain itu universitas juga tempat untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan dialog antar agama melalui pengabdian masyarakat dan KKN. Pada akhirnya universitas adalah medan penyemaian bibit toleransi dan pertukaran cerita-cerita positif tentang relasi antar agama. Selain itu suara akademisi juga sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu penting untuk mendorong para akademisi agar memahami prinsip-prinsip inklusifitas.	by mothers to their children within their respective households. Another important actor is kinship ties or networks. In general, many of the families in the study site were mixed families or consisted of different religions and beliefs. Therefore, the understanding of inclusiveness in real terms first occurs in the family environment. In some FGD locations, indigenous communities have a central role as tolerant actors because relations between different religious groups can be bridged by local customs and traditions. Therefore, the role of indigenous community leaders is crucial. Another actor who is considered to play an important role but is almost forgotten is political parties. However, intolerant actions and statements are often in the context of political power struggles. Therefore, it is very important to embrace political parties so that they can participate in understanding and disseminating the values and principles of inclusiveness. The last actors to emerge from the FGD were informal business groups such as market traders and motorcycle taxi drivers. This kind of small business actor is very dependent on regional conduciveness. Therefore, they are very interested in a harmonious and tolerant situation rather than violence. The Role of Women and the Inclusivity Movement In the FGDs held in five cities, the team got an overview of the important role of women who have the potential to become actors of peace and inclusivity. In general, women in the five cities are actively building networks, especially at the grassroots level. The networks built are usually formally cross-religious organizations. Some women have important roles in religious organizations, namely as religious leaders such as pastors or nyai mothers (wives of kyai
--	---

Media juga berpotensi menjadi aktor yang penting baik sebagai agen penyebar toleransi maupun sebaliknya. Di beberapa kota radio dan surat kabar lokal adalah media yang dominan, namun secara umum media sosial dan media online merupakan penyebar informasi yang cepat dan mudah dijangkau semua orang. Selain media, civil society organization (CSO) juga menjadi aktor penting yang menggerakkan toleransi maupun intoleransi. Dalam konteks paska konflik, CSO yang diinisiasi para perempuan bekerja sangat keras dalam mendorong terjadinya perdamaian di tingkat akar rumput. Melalui jejaring luas dan kuat CSO adalah aktor yang potensial. Aktor berikutnya adalah para perempuan, terutama ibu-ibu. Perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip perdamaian dan inklusitas ditebarkan dan diturunkan oleh para ibu kepada anak-anak mereka di dalam rumah tangga masing-masing. Aktor lain yang juga penting adalah ikatan atau jaringan kekeluargaan. Secara umum keluarga-keluarga di lokasi penelitian banyak yang merupakan keluarga campuran atau terdiri dari agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pemahaman inklusitas secara riil pertama-tama terjadi di lingkungan keluarga. Di beberapa lokasi FGD, komunitas adat memiliki peran sentral sebagai aktor toleran sebab relasi antar kelompok agama yang berbeda dapat dijembatani oleh adat dan tradisi setempat. Oleh karena itu peran tokoh komunitas adat sangatlah krusial. Aktor lain yang dianggap berperan penting namun nyaris terlupakan adalah partai politik. Bagaimanapun juga tindakan dan pernyataan intoleran seringkali berada di dalam konteks perebutan pengaruh politik. Oleh karena itu penting sekali untuk merangkul partai politik	and religious teachers in pesantren) and also as teachers in formal education organizations. However, in one city, women, especially mothers, succeeded in initiating faith dialogue across neighbors that was informal and tested when preventing fights between villages and even shoulder to shoulder during the Covid19 pandemic. Besides being informal, the role of women at the lower level can also be accommodated by PKK and Karang Taruna. The role of women in the movement to build inclusivity is also not limited to religious issues but across issues, especially the protection of women and children and children's education. This issue is an important issue for women, where women, especially mothers, play a central role in the character education of children in their respective homes. The role of the mother as a primary educator for her children has the aim of preparing a bright future, without problems for her children. For them, saving the surrounding environment starts from saving their children by instilling positive values. Rather than political, the role of these mothers has a pure purpose which is to prepare for the future of their children. Woman. Important Factors that support Inclusivity Key factors supporting inclusivity in the five study cities are as follows: 1. Education of the values of inclusivity and tolerance within the family sphere. This is important because the family is a place of primary socialization and a place to shape values for children. 2. Education of the values of inclusivity and tolerance in formal schools. Schools are meeting places for students from various social and cultural backgrounds; therefore, schools have the potential to become a seedbed of tolerance values. Schools are encouraged to accommodate
---	---

agar mereka dapat turut memahami dan menyebarluaskan nilai dan prinsip inklusifitas. Aktor terakhir yang muncul dari FGD adalah kelompok usaha informal seperti pedagang di pasar dan tukang ojek. Pelaku usaha kecil semacam ini sangat bergantung dari kondusifitas wilayah. Oleh karena itu mereka sangat berkepentingan terhadap situasi yang rukun dan toleran alih-alih kekerasan. Peran Perempuan dan Gerakan Inklusivitas Dalam FGD yang diadakan di lima kota, tim mendapatkan gambaran mengenai peran penting dari perempuan yang berpotensi menjadi aktor perdamaian dan inklusivitas. Secara umum para perempuan di lima kota aktif membangun jejaring terutama di tingkat akar rumput. Jejaring yang dibangun biasanya bersifat lintas organisasi keagamaan secara formal. Beberapa perempuan memiliki peran yang penting di dalam organisasi keagamaan yaitu sebagai pemimpin agama seperti pendeta atau ibu nyai (istri kyai sekaligus guru agama di pesantren) dan juga sebagai guru di organisasi pendidikan formal. Meskipun demikian di salah satu kota, perempuan, khususnya ibu-ibu berhasil menginisiasi dialog iman lintas tetangga yang bersifat informal dan teruji saat mencegah perkelahian antar kampung serta bahkan bahu-membahu di masa pandemi covid19. Selain bersifat informal, peran perempuan di tingkat bawah juga dapat diwadahi oleh PKK dan Karang Taruna. Peran perempuan dalam gerakan membangun inklusivitas juga tidak terbatas dalam isu keagamaan saja melainkan lintas isu, terutama perlindungan perempuan dan anak serta pendidikan anak-anak. Isu ini merupakan isu yang penting bagi kaum	the dissemination of these values into the curriculum. - Utilization of traditional and cultural symbols as a means of unifying people of different religions. Local cultural innovation is a positive thing to do with the aim of being a bridge of communication between religious communities. In this context, for example, government and universities can play a positive role. - Education of the values of inclusivity and tolerance for women. As primary educators for children, women are also expected to be literate and able to understand the values of inclusivity. - A balanced role of the media is also an important factor for driving inclusivity. The media in question is not only local print media but also online media and other electronic media. - In a city where there has been a conflict with religious nuances, the balance of religion in the government structure becomes an important issue. If the governing official exercises favoritism based on his religious background, inclusivity can be compromised. Therefore, the issue of religious balance is an important factor to do. - The central government is expected to act fairly towards all followers of religions and beliefs. Regulations on the establishment of houses of worship should be applied fairly to all religious groups and beliefs. Special Notes - From several FGDs in the area, it was found that there were many religions outside the 6 religions recognized by the Indonesian government. These religions are with diverse conditions:
---	--

perempuan, di mana perempuan terutama kaum ibu berperan sentral dalam pendidikan karakter anak di dalam rumah masing-masing. Peran ibu sebagai pendidik primer bagi anak-anaknya memiliki tujuan untuk menyiapkan masa depan yang cerah, tanpa masalah bagi anak-anaknya. Bagi mereka menyelamatkan lingkungan sekitar dimulai dari menyelamatkan anak-anak mereka dengan menanamkan nilai-nilai positif. Alih-alih politis, peran para ibu ini memiliki tujuan yang murni yaitu untuk menyiapkan masa depan anak-anak mereka. Faktor Penting yang mendukung Inklusivitas Faktor-faktor penting yang mendukung inklusivitas di lima kota penelitian adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi di dalam lingkup keluarga. Hal ini menjadi penting sebab keluarga merupakan tempat sosialisasi primer dan tempat belanja nilai-nilai bagi anak-anak. 2. Pendidikan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi di dalam sekolah formal. Sekolah adalah tempat pertemuan peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, oleh karena itu sekolah berpotensi menjadi tempat persemaian nilai-nilai toleransi. Sekolah didorong untuk mengakomodasi penyebaran nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum. 3. Pemanfaatan simbol-simbol adat dan kebudayaan sebagai sarana pemersatu masyarakat yang berbeda agama. Inovasi kebudayaan lokal menjadi hal yang positif dilakukan dengan tujuan sebagai jembatan komunikasi antar komunitas agama. Dalam konteks ini	a. Originating from outside the archipelago, not related to the six existing religions; b. Originating from outside the archipelago, but related to one of the six existing religions, so it is often referred to as a cult, splinter and various other pejorative terms; c. Grow from local communities in the archipelago, have a complete organizational structure and holy scriptures. 2. Various streams of belief with different characteristics, grew from local communities but some were later spread everywhere. 3. There are cities that are affected by other city policies, related to the treatment of other cities towards minorities in that city. For example, one statement from a local leader in Manado said that if in Java, churches are difficult to build, then it is appropriate that mosques are also difficult to build in Manado. 4. On the other hand, there are cities that are also not affected by intolerant policies in other cities. In Kupang City, for example, one of the participants stated that what happened on the island of Java (related to the establishment of minority houses of worship), did not affect the policy of establishing minority houses of worship in Kupang. Closing Remarks The mapping of local leaders through FGDs reveals a lot related to freedom of religion and belief. After this, the next stage is to form a network that will be connected through the website with joint management.
--	--

misalnya pemerintah dan universitas dapat memainkan peran positif. 4. Pendidikan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi bagi perempuan. Sebagai pendidik primer bagi anak-anak maka perempuan juga diharapkan melek dan mampu memahami nilai-nilai inklusivitas. 5. Peran media yang berimbang juga merupakan faktor penting bagi pendorong inklusivitas. Media yang dimaksud tidak hanya media cetak lokal melainkan juga media online dan media elektronik lainnya. 6. Di kota yang pernah terjadi konflik bernuansa agama, maka keseimbangan agama di dalam struktur pemerintahan menjadi isu yang penting. Bila pejabat yang sedang memerintah melakukan favoritisme berdasarkan latar belakang keagamaannya maka inklusivitas dapat terganggu. Oleh karena itu isu keseimbangan agama menjadi faktor yang penting untuk dilakukan. 7. Pemerintah pusat diharapkan dapat bertindak adil terhadap semua pemeluk agama dan keyakinan. Peraturan mengenai pendirian rumah ibadah seharusnya diberlakukan secara adil bagi semua kelompok agama dan kepercayaan. Catatan Khusus 1. Dari beberapa FGD di daerah, ditemukan ada banyak agama-agama di luar 6 agama yang diakui oleh pemerintah RI. Agama-agama ini dengan beragam kondisi: a. Berasal dari luar wilayah nusantara, tidak terkait dengan keenam agama yang sudah ada;	Appendices FGD Transcripts (in Bahasa Indonesia)
---	---

b. Berasal dari luar wilayah nusantara, namun terkait dengan salah satu dari enam agama yang sudah ada, sehingga sering disebut sebagai aliran sesat, sempalan dan berbagai istilah peyoratif lainnya c. Tumbuh dari komunitas-komunitas local di nusantara, memiliki struktur organisasi yang lengkap dan kitab yang jelas 2. Berbagai aliran kepercayaan dengan karakteristik yang berbeda-beda, tumbuh dari komunitas local tetapi ada juga yang kemudian tersebar kemana-mana. 3. Ada kota yang terpengaruh dengan kebijakan kota lainnya, terkait dengan perlakuan kota lain tersebut terhadap minoritas di kota itu. Misalnya, salah satu pernyataan dari pemimpin local di Manado mengatakan bahwa jika di Jawa, gereja sulit di bangun, maka sudah layak kalau Masjid juga susah dibangun di Manado. 4. Di sisi lain, ada kota yang juga tidak terpengaruh dengan kebijakan intoleran di kota lainnya. Kota Kupang, misalnya, salah seorang peserta menyatakan bahwa apa yang terjadi di pulau Jawa (terkait pendirian rumah ibadah minoritas), tidak mempengaruhi kebijakan pendirian rumah ibadah minoritas di Kupang. Penutup Pemetaan pemimpin lokal dengan melalui FGD mengungkapkan banyak hal terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Setelah ini tahapan selanjutnya adalah membentuk jejaring yang akan terhubung melalui website dengan pengelolaan bersama.	
--	--

Lampiran-Lampiran

Transkrip FGD

- Kupang
- Manado
- Surabaya
- Ambon
- Depok
- Denpasar